



Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Kota Jambi (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi)

Mimi Dwi Aufa¹⁾, Riky Novarizal²⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau

mimidwiaufa@student.uir.ac.id¹⁾

riky.novarizal@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius. Menanggapi hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya rehabilitasi berbasis komunitas. Program ini menasar pengguna narkoba tingkat rendah agar memperoleh bantuan tanpa proses hukum pidana. Penelitian di BNN Provinsi Jambi menunjukkan bahwa IBM efektif menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, penjangkauan, dan asesmen individu. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan implementasi IBM memenuhi empat aspek kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. IBM juga merupakan bentuk kebijakan Kriminal non pidana yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hukuman. Dengan demikian, IBM menjadi alternatif strategis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara lebih manusiawi dan efektif.

Kata kunci: Intervensi Berbasis Masyarakat, Kebijakan Kriminal, Narkoba

Abstract

Drug abuse in Indonesia continues to rise, causing serious social, economic, and health impacts. In response, the National Narcotics Agency (BNN) developed the Community-Based Intervention Program (IBM) as a community-centered rehabilitation effort. This program targets low-level drug users to provide assistance without going through criminal prosecution. A study conducted at the BNN Provincial Office in Jambi shows that IBM is effective in reducing drug abuse through public outreach, mapping high-risk areas, outreach to users, and individual assessments. Qualitative research findings indicate that the implementation of IBM fulfills four key policy aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. IBM also represents a non-penal criminal policy that emphasizes rehabilitation and social reintegration rather than punishment. Thus, IBM serves as a strategic and humane alternative in addressing drug abuse more effectively.

Key words: Community Based Intervention, Criminal Policy, Narcotics

PENDAHULUAN

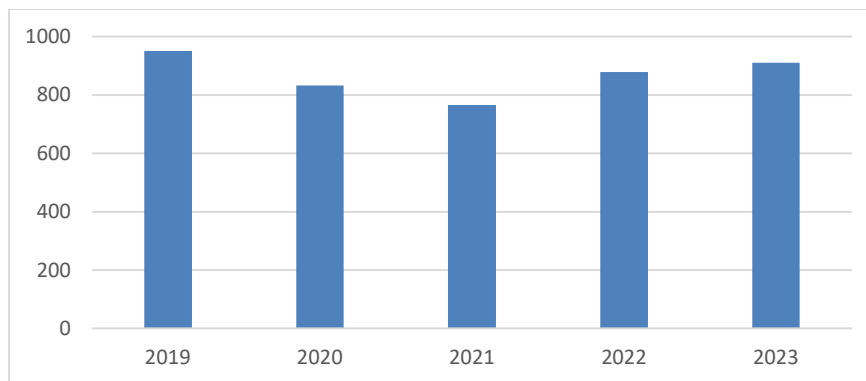
Narkoba merupakan zat yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga golongan. Golongan I, seperti heroin dan ganja, tidak diperuntukkan bagi kepentingan medis. Sementara itu, Golongan II dan III, seperti morfin dan kodein, dapat digunakan secara terbatas untuk tujuan pengobatan. Narkoba bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada perasaan, suasana hati, dan persepsi (Putra, 2018:1). Belakangan ini, marak terjadi penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai



Tindakan penggunaan narkoba tanpa pengawasan tenaga medis. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang serius, karena dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta kehidupan sosial pengguna. Dampak tersebut antara lain mencakup kerusakan organ tubuh, gangguan kejiwaan, dan peningkatan risiko terhadap perilaku kriminal.

Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan, mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, kesehatan publik, dan stabilitas sosial. Berikut data penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019-2023:

Grafik 1 Jumlah Kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2019-2023



Sumber: Data BNN 2023

Berdasarkan Grafik 1, jumlah kasus narkoba mencapai puncaknya pada 2019 dengan 951 kasus, kemudian menurun menjadi 833 kasus pada 2020. Pada 2021, angka kasus kembali turun menjadi 766, menunjukkan peningkatan kesadaran dan penegakan hukum. Namun, pada 2022 jumlah kasus meningkat menjadi 879, dan kembali naik menjadi 910 kasus pada 2023, menandakan bahwa masalah narkoba masih memerlukan perhatian serius meskipun ada upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebagai lembaga utama dalam penanggulangan masalah narkoba, BNN tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif. Salah satu upaya preventif yang diluncurkan adalah Program Intervensi Berbasis Masyarakat, yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan program rehabilitasi pecandu narkoba yang dikembangkan oleh dan untuk masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP), dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Nyandra et al., 2024:77). Program ini ditujukan bagi pengguna narkoba tingkat rendah hingga mereka yang membutuhkan layanan lanjutan, dengan pendekatan yang mencakup aspek keagamaan, psikologis, dan sosial. Kegiatan IBM meliputi penjangkauan, deteksi dini, edukasi, bimbingan, dan



rujukan, serta melibatkan pecandu, keluarga, komunitas, dan aparat pemerintah daerah (Yanto et al., 2023:401). Agen Pemulihan bertugas mendampingi pengguna dan menyediakan layanan prarehabilitasi di tingkat masyarakat.

Sosialisasi bahaya narkoba telah meningkatkan kesadaran masyarakat, namun angka penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi tetap tinggi. Meskipun pemahaman meluas, jumlah kasus terus meningkat. Tantangan utama adalah rendahnya rehabilitasi sukarela, dengan banyak pengguna enggan mencari bantuan akibat stigma sosial, ketakutan akan hukuman, dan kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi yang humanis

Dalam kaca mata Kriminologi khususnya dalam kebijakan kriminal program Intervensi Berbasis Masyarakat ini merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh BNN dalam meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba. Kebijakan Kriminal merupakan usaha yang dilakukan masyarakat atau negara dalam rangka menanggulangi kejahatan (Rifa'i:2012:3). Oleh karena itu, implementasi program Intervensi Berbasis Masyarakat ini penting diteliti guna untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan dapat berhasil menekan angka penyalahgunaan narkoba. Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan memaparkan bagaimana implementasi program Intervensi Berbasis Masyarakat melalui lensa Implementasi Kebijakan Edward III untuk mengidentifikasi empat aspek kunci yang memengaruhi efektifitas dalam implementasi suatu kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat pihak, yaitu konselor adiksi BNN Provinsi Jambi, Agen Pemulihan IBM Putri Kedap, klien IBM Putri Kedap, serta perwakilan masyarakat setempat. Setelah melakukan wawancara mendalam maka data akan dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan program Intervensi Berbasis Masyarakat, terdapat beberapa komponen penting yang berperan dalam menentukan keberhasilan program ini. Komponen-komponen tersebut meliputi pelaksana program IBM, yang terdiri dari BNNP, BNN Kabupaten, dan BNN Kota, serta Desa/Kelurahan, Agen Pemulihan, dan Klien IBM. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat antara lain: pertama, **sosialisasi**, yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat agar mereka memiliki pemahaman yang jelas dan tepat mengenai program IBM. Kedua, **pemetaan**, yaitu kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai penyalahgunaan narkoba di wilayah sekitar, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penjangkauan. Ketiga, **penjangkauan**, yang mencakup penyampaian informasi serta pendekatan kepada pengguna narkoba, keluarga, atau masyarakat sekitar untuk memberikan dukungan dan edukasi.

Untuk memudahkan penjelasan hasil penelitian dan membantu pembaca memahami pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Unit IBM Putri Kedap, penulis menyajikan alur pelaksanaan program serta jenis kegiatan dan

layanan yang diberikan dalam bentuk gambar. Penyajian ini bertujuan agar proses dan tahapan dalam program dapat dilihat dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Berikut kegiatan dan layanan IBM yang terdapat di unit IBM Putri Kedap:

Gambar 1 Kegiatan dan Layanan IBM

KEGIATAN DAN LAYANAN IBM		MATERI
Kegiatan IBM	Sosialisasi, Pemetaan dan Penjangkauan	Sosialisasi, Pemetaan & Penjangkauan Peraturan Terkait Rehabilitasi Narkoba Pengetahuan Prinsip Dasar Adiksi
Skrining	Skrining	Skrining
Penerimaan Awal	Penerimaan awal	Pengisian Instrumen IBM - Roda Kehidupan
Layanan Intervensi - Wajib	KIE (Kelompok / Individu)	Pengetahuan Prinsip Dasar Adiksi Perilaku Hidup Sehat
	Kunjungan Diri (Individu)	Mengelola Pertemuan Keluarga
	Keterampilan Hidup (Kelompok)	Keterampilan Hidup
Layanan Intervensi - Pilihan	Kelompok Dukungan Sebaya (Kelompok)	Mengelola Pertemuan KDS
	Pencegahan Kekambuhan (Kelompok/Individu)	Pencegahan Kekambuhan
	Fasilitasi Rujukan	Pengembangan Diri - Rujukan
Bina Lanjut	Pemantauan (Individu)	Pencegahan Kekambuhan Pengembangan diri
Tambah Pengetahuan Menjadi AP		AP yang Efektif Komunikasi Efektif

Sumber: Badan Narkotika Nasional IBM

Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pemetaan, dan penjangkauan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP). Setelah berhasil menjangkau klien, AP melakukan skrining awal menggunakan DAST-10. Klien dengan tingkat penyalahgunaan rendah dapat mengikuti program IBM, sementara klien dengan tingkat penyalahgunaan sedang hingga tinggi akan dirujuk ke BNN Provinsi. IBM terdiri dari **layanan wajib** dan **layanan pilihan**. Layanan wajib meliputi **KIE** (Kegiatan Informasi dan Edukasi) yang bertujuan memberikan informasi dan motivasi terkait pemulihan adiksi dan permasalahannya, **kunjungan individu** yang melibatkan komunikasi antara klien, keluarga, dan kerabat yang berpengaruh pada proses kesembuhan klien, serta **pelatihan keterampilan hidup** yang memberikan pembekalan kepada klien agar dapat kembali beradaptasi dengan masyarakat. Sementara itu, **layanan pilihan** meliputi **dukungan sebaya**, yaitu kegiatan pertemuan yang diadakan antara sesama klien, keluarga, atau kedua **pencegahan kekambuhan**, yang melibatkan deteksi dini tanda-tanda kekambuhan serta teknik pencegahannya **dan fasilitasi rujukan**, yang menghubungkan klien

dengan akses layanan yang dibutuhkan untuk layanan lanjutan.

Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Unit Putri Kedap berhasil mengurangi penyalahgunaan narkotika antara tahun 2021 hingga 2024. Jumlah pengguna aktif menurun, sementara lebih banyak orang ikut serta dalam rehabilitasi dan kembali ke masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan berbasis masyarakat, penyuluhan, dan peran keluarga. Program ini terbukti efektif dan bisa dijadikan contoh untuk daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Berikut data unit IBM, AP dan Jumlah Klien:

Gambar 2 Jumlah Unit IBM, AP dan Klien di Lingkungan Provinsi Jambi



Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Keberhasilan IBM Putri Kedap didukung oleh kolaborasi antara Agen Pemulihan (AP), tokoh masyarakat, keluarga, dan BNN. AP menggunakan pendekatan berbasis religi dan pemulihan sosial untuk menciptakan lingkungan pemulihan yang kondusif. Program ini juga mencakup edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk remaja dan kelompok rentan, guna meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika. Selain penurunan jumlah pengguna, keberhasilan juga terlihat dari reintegrasi sosial mantan pengguna yang kembali produktif di masyarakat. Pendekatan holistik ini menunjukkan dampak positif jangka panjang bagi komunitas.

Analisis Kebijakan Kriminal Pada Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat

Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui negara dalam rangka menanggulangi kejahatan yang tidak hanya berfokus pada aspek represif tapi juga mencakup pendekatan preventif dan rehabilitatif. (Rifa'i:2012:3). Program Intervensi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu bentuk kebijakan kriminal non penal yang mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di tingkat komunitas. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal non penal, Intervensi Berbasis



Masyarakat dijalankan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan kuratif, dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah desa serta Agen Pemulihan (AP) sebagai pelaksana lapangan.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dilakukan dengan dua fokus utama, yaitu pencegahan dan rehabilitasi. Pada aspek pencegahan, program ini mengutamakan kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye anti-narkoba kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan seperti remaja dan pemuda. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan kriminal modern yang berupaya mencegah kejahatan sebelum terjadi. Sementara itu, pada aspek rehabilitasi, IBM memberikan pendampingan dan layanan pemulihan bagi orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa perawatan medis, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial agar mereka bisa pulih secara menyeluruh dan kembali hidup normal di tengah masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi kesempatan untuk sembuh, berubah, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah pendekatan yang menggabungkan pencegahan dan rehabilitasi dalam satu program terpadu, dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi karena tidak hanya bertujuan mencegah orang menggunakan narkoba, tetapi juga membantu mereka yang sudah terlanjur memakai untuk pulih dan kembali menjalani hidup normal. IBM menyediakan edukasi tentang bahaya narkoba serta layanan pemulihan yang mencakup bantuan medis, psikologis, dan sosial. Dengan cara ini, IBM tidak hanya menghentikan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para pengguna, sesuai dengan pendekatan hukum modern yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada perubahan dan pemulihan.

Pendekatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) selaras dengan prinsip kebijakan kriminal modern, yang menekankan bahwa penanganan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Dalam kebijakan kriminal modern, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menanggapi kejahatan dengan tindakan represif, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan dengan mengedepankan upaya pencegahan, sambil memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

IBM, sebagai bagian dari kebijakan ini, melibatkan peran aktif masyarakat dalam menangani masalah narkoba. Masyarakat tidak hanya dilindungi dari dampak negatif narkoba, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam upaya pencegahan, seperti melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, serta dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba. Pendekatan ini berupaya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung, di mana masyarakat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan membantu pemulihan individu yang terdampak. Dengan demikian, IBM mencerminkan kebijakan kriminal yang lebih holistik, yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberi kesempatan untuk perbaikan dan reintegrasi sosial, menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan harmonis.

Analisis Implementasi Kebijakan Edward III Pada Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat

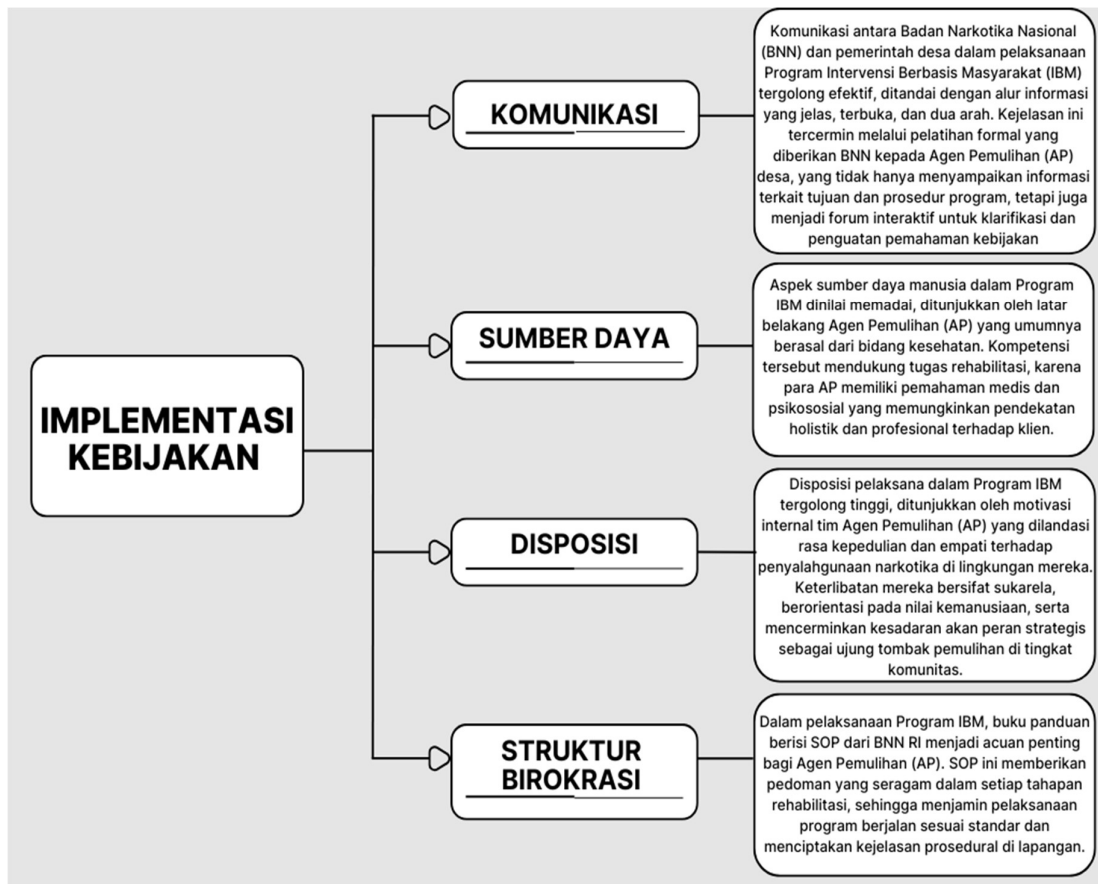
Edwards III mengidentifikasi empat variabel utama yang dianggap sebagai syarat

penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling terkait dan berkontribusi terhadap sejauh mana suatu kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata di lapangan. (Tachjan:2006:8). Keempat variabel tersebut sebagai berikut:

Gambar 3 Analisa Program IBM Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan dalam menyampaikan tujuan, strategi, dan prosedur kepada seluruh pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antara



BNN dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dinilai cukup efektif. Hal ini tercermin dari pelatihan formal yang dilakukan secara sistematis oleh BNN kepada Agen Pemulihan (AP), yang bertujuan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan program secara optimal di tingkat masyarakat.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara, pelaksanaan



Program IBM telah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, di mana Agen Pemulihan (AP) umumnya berlatar belakang kesehatan. Hal ini mendukung efektivitas program, karena AP memiliki pemahaman medis dan psikososial yang relevan untuk menangani klien secara holistik dan profesional.

Disposisi

Dalam pelaksanaan Program IBM, disposisi Agen Pemulihan (AP) di lapangan menunjukkan sikap yang sangat positif. Berdasarkan wawancara, motivasi mereka tidak semata-mata karena tugas formal, tetapi didorong oleh kepedulian terhadap generasi muda dan keinginan untuk mendorong perubahan sosial. Sikap sukarela, empati, dan kesadaran akan peran mereka sebagai ujung tombak pemulihan mencerminkan tingginya komitmen dan motivasi internal dalam mendukung program.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran penting dalam efektivitas kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Edwards melalui dua elemen utama: SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), keberadaan buku panduan SOP yang disusun oleh BNN RI menjadi acuan resmi bagi Agen Pemulihan (AP) dalam menjalankan tugas rehabilitasi secara seragam dan terstruktur. Sementara itu, fragmentasi tidak menjadi hambatan dalam program ini, karena seluruh pelaksanaan berada di bawah koordinasi BNN Provinsi, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dan mendukung efisiensi implementasi.

Jika keempat aspek utama dalam teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat dipenuhi dengan baik, maka program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) berpeluang besar untuk berhasil menekan angka penyalahgunaan narkotika. Komunikasi yang jelas akan memastikan semua pihak memahami tujuan dan cara kerja program. Dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, sikap pelaksana yang positif, peduli, dan memiliki komitmen tinggi akan mendorong keberhasilan di lapangan. Struktur birokrasi yang mendukung, tidak kaku, dan mampu menjalin kerja sama antar instansi juga akan memperlancar pelaksanaan. Dengan terpenuhinya semua elemen ini, program IBM dapat menjadi cara yang efektif dan manusiawi dalam membantu mencegah serta menangani penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi, khususnya di wilayah IBM Putri Kedap. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan program dianalisis melalui empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini saling mendukung dan berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan program. Hasilnya, terlihat adanya penurunan angka penyalahgunaan narkotika selama program berlangsung, yang menjadi indikator keberhasilan IBM dalam mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi di masyarakat.

Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah kebijakan Badan Narkotika Nasional yang bertujuan menekan kriminalitas narkotika melalui pendekatan non-pidana. Program ini mencerminkan kebijakan kriminal modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. IBM berfokus pada pemulihan pengguna di luar lembaga pasyarakatan



dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui Agen Pemulihan. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara aspek hukum dan sosial, menjadikan IBM sebagai bentuk implementasi kebijakan kriminal yang lebih komprehensif dan humanis dalam penanggulangan narkoba.

Kedepannya diharapkan agar adanya evaluasi efektivitas Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur dampaknya dalam jangka panjang, terutama terhadap pengurangan angka penyalahgunaan narkoba dan reintegrasi sosial pengguna. Penelitian selanjutnya bisa membandingkan wilayah yang melaksanakan IBM dengan yang tidak, serta menggali lebih dalam peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Selain itu, peningkatan kapasitas Agen Pemulihan melalui pelatihan dan penguatan kerjasama antara BNN, pemerintah desa, dan masyarakat juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada keluarga yang selalu memberikan semangat, doa, dan cinta yang tak terhingga. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan berbagi ide yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari kalian semua, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Ri. (2018). AWAS NARKOBA MASUK DESA.
Badan Narkotika Nasional (2021). INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
Nyandra, M., Made Kurniati, N., & Lestari Herlina. (2024). Evaluation of
Implementation the Community-Based Intervention (IBM) in Pemecutan Kelod
Village, West Denpasar District Evaluasi Implementasi Program Intervensi
Berbasis Masyarakat (IBM) di. 3(1).
<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index>
Putra, I. (2018). UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DI LAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi BNN Provinsi
Bali). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Rifa'i Eddy (2012) KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN
Tachjan (2006) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Yanto, A., Chatra, E., & Arif, E. (2023). Komunikasi Badan Narkotika Nasional
Sumatera Barat dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat
(IBM). MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2),
400–412. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7154>
Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba